

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo

Rinto Adi Hermawan¹ Endah Fajar Hidayah²

Progrm Studi Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Indonesia^{1,2}

Email: rintoadi511@gmail.com¹ nurendahfajarhidayah@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini menekankan pentingnya pengelolaan dana desa yang akuntabel, hal tersebut didorong oleh besarnya anggaran dan munculnya kasus korupsi di beberapa desa. Akuntabilitas dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, kompetensi aparatur desa, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode survei, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif, sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sukoharjo, yaitu sebanyak 450 orang. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 210 orang. Besar sampel dihitung dengan menggunakan tabel Krejcie & Morgan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan: kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Sukoharjo.

Kata Kunci: Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa tujuan penyaluran dana desa merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Anggaran dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Perangkat desa dalam melakukan pengelolaan dana desa, ada yang melakukan kecurangan dengan melakukan korupsi dalam pengelolaan dana desa. Kasus penggelapan atau korupsi dana desa juga terjadi di wilayah hukum Kabupaten Sukoharjo. Sebagai contoh adalah kasus korupsi dana desa di Desa Krajan, Kecamatan Weru yang dilakukan oleh Sri Widayati pada tahun 2022 yang menjabat sebagai kepala urusan (kaur) keuangan dan merangkap sebagai Bendahara Desa Krajan, Kecamatan Weru. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Semarang, tersangka divonis 2 (dua) tahun penjara dan dikenakan denda senilai Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan, serta uang pengganti senilai Rp 194 juta subsider 6 bulan penjara (Radar Solo, 2 November 2024).

Kasus penggelapan dana desa yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo juga terjadi di Desa Godog Kecamatan Polokarto. Pada kasus tersebut Kepala Desa Godog diduga menyelewengkan dana desa sebesar Rp 600 juta, hal tersebut mengakibatkan warga dan pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan protes dan penyegelan Kantor Desa. Dugaan masyarakat desa soal penyelewengan ini bermula dari permintaan laporan penggunaan anggaran dana desa tahun 2022/2023 oleh pengurus BPD. Laporan itu diminta sejak tahun

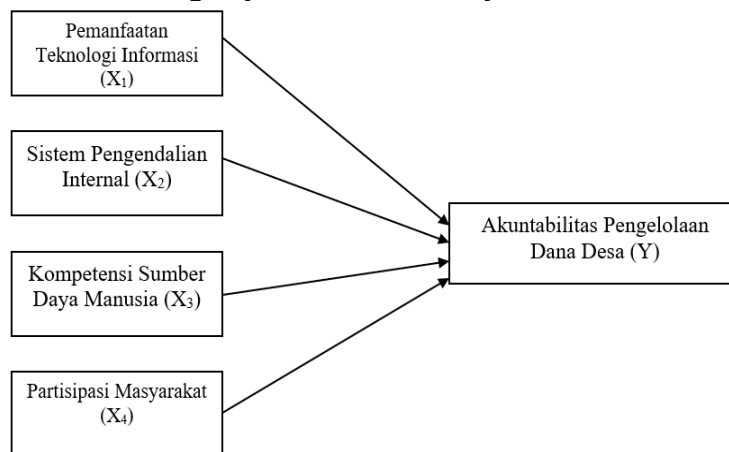
2023 dengan perhitungan pelaksanaan anggaran senilai kurang lebih Rp600 juta, tetapi Kepala Desa Godog Agus Adi Setiawan tidak pernah memberikan laporan keuangan yang diminta oleh BPD dan masyarakat (Elshinta.com, 12 Juli 2024). Berdasarkan uraian kasus di atas, menunjukkan bahwa peran pengelola dana desa yang terdiri dari aparatur desa itu sendiri (kepala desa, sekertaris desa, dan bendahara desa) merupakan salah satu faktor penting tercapainya tujuan pengalokasian dana desa serta terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Meilisa (2024) dan Adelia (2022) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Nugroho (2022), Harini (2022), Riyadi (2020) dan Pahlawan (2020) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sistem pengendalian internal dalam mengelola dana desa sangat diperlukan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, sehingga dengan komitmen dan tanggungjawab yang baik pada pengendalian internal dana desa maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan membaik. Penjelasan di atas didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhaeda (2024) dan Sakdiah (2022) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Kaharudin (2024), Tiarno (2023), Nugroho (2022) dan Pahlawan (2020) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Seorang aparatur desa harus memiliki kemampuan yang baik agar dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa tersebut karena aparatur desa yang berkompeten dalam mengelola keuangan desa dapat meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa tersebut, dan begitu pula sebaliknya. Pernyataan tersebut didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhaeda (2024), Sundari (2024), Meilisa (2024), Adelia (2022) dan Pahlawan (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Kaharudin (2024), Tiarno (2023) dan Hariani (2022) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Mardiasmo (2018: 33) mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa (Sujarweni, 2015: 29).

Pernyataan tersebut didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sundari (2024), Nugroho (2022), Harini (2022) dan Pahlawan (2020) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Kaharudin (2024) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengaruh sistem pengendalian internal, pengaruh kompetensi sumber daya manusia, dan pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sukoharjo. Teori mendasari penelitian ini adalah bagian dari *agency theory* yaitu *stewardship theory*, yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi

menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut (Sujarweni, 2015: 26).

Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*. Akuntansi sebagai penggerak (*driver*) berjalannya transaksi bergerak kearah yang semakin kompleks dan diikuti dengan tumbuhnya spesialisasi dalam akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik. Kontrak hubungan antara *stewards* dan *principals* atas dasar kepercayaan (amanah), bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi. Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Desa (*steward*) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat (*principal*). Pemerintah desa melaksanakan tugasnya dalam membuat pertanggungjawaban keuangan berupa penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan karakteristik laporan keuangan (relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan). Peneliti dalam upaya menunjukkan suatu arah dari penyusunan agar dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas, maka dalam penelitian ini penulis membuat suatu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

- H1: Ada pengaruh positif signifikan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sukoharjo.
- H2: Ada pengaruh positif signifikan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sukoharjo.
- H3: Ada pengaruh positif signifikan kompetensi sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sukoharjo.
- H4: Ada pengaruh positif signifikan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sukoharjo.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian survei pada pemerintah desa di Kabupaten Sukoharjo. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer diperoleh dengan memberikan kuesioner kepada responden terpilih yang berisikan pernyataan tentang variabel-variabel penelitian. Populasi pada penelitian ini 150 desa yang terdiri dari 12 kecamatan, sehingga jumlah populasinya yaitu 150 desa x 3 orang = 450 orang. Sampel yang digunakan

adalah sebanyak 210 orang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan pemberian skor didasarkan pada kriteria skala *Likert*. Instrumen yang digunakan dalam penelitian tersebut dikatakan andal (*reliable*) apabila memiliki koefisien *cronbach's alpha* > 0,60 sebaliknya apabila memiliki koefisien *cronbach's alpha* < 0,60 maka dinyatakan tidak reliabel (Ghozali, 2018: 140). Uji reliabilitas dari variabel-variabel penelitian yang menggunakan *Cronbach's alpha*. Teknik uji asumsi klasik analisis data peneloitian ini menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji multikolinearitas, autokorelasi, uji Heteroskedastisitas, dan uji Normalitas. Sedangkan uji analisis data menggunakan uji deskriptif, uji regresi linear berganda, uji F, uji koefisien determinasi, dan uji t.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa memperoleh rata-rata skor 4,28 dengan kategori sangat baik. Hal ini berarti mayoritas responden telah mampu mengoperasikan komputer untuk penyusunan anggaran, pelaporan keuangan, serta evaluasi program desa. Selain itu, penggunaan jaringan internet juga sudah dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang efektivitas dan efisiensi kerja aparatur desa, termasuk dalam menghubungkan antar perangkat desa untuk mengirimkan data maupun informasi. Tingginya skor ini memperlihatkan bahwa teknologi informasi berperan penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun demikian, kebijakan yang dapat diambil untuk semakin meningkatkan akuntabilitas adalah memperkuat infrastruktur teknologi informasi di desa, terutama jaringan internet yang stabil, serta mengembangkan aplikasi keuangan desa yang lebih terintegrasi. Selain itu, perlu ada pelatihan lanjutan bagi aparatur desa agar mampu memanfaatkan teknologi bukan hanya untuk administrasi, tetapi juga untuk publikasi laporan secara terbuka kepada masyarakat luas.

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₁)

No.	Pernyataan	Rata-rata	Kategori
1	Saya mampu mengoperasikan komputer untuk menyusun anggaran hingga penyusunan laporan evaluasi dan pengelolaan dana desa.	4,31	Sangat Baik
2	Penyusunan laporan keuangan dan evaluasi laporan keuangan dibuat dengan menggunakan komputer.	4,37	Sangat Baik
3	Penggunaan komputer mempermudah dalam mengolah data laporan keuangan secara akuntabel dan meningkatkan kualitas hasil pekerjaan	4,22	Sangat Baik
4	Saya memanfaatkan jaringan internet untuk menunjang kinerja yang efektif dan efisien.	4,26	Sangat Baik
5	Jaringan internet dimanfaatkan sebagai penghubung antara aparatur dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.	4,26	Sangat Baik
	Rata-rata	4,28	Sangat Baik

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Rata-rata skor sistem pengendalian internal sebesar 4,10 dengan kategori baik. Responden menilai bahwa struktur organisasi dan pemisahan tugas sudah berjalan, termasuk adanya otorisasi kepala desa dalam setiap transaksi keuangan. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan, misalnya terkait kecepatan pengolahan laporan keuangan dan konsistensi evaluasi yang dilakukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal sudah cukup baik, tetapi masih perlu penguatan agar benar-benar menjamin keakuratan serta keandalan pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, kebijakan yang disarankan meliputi penyusunan SOP pengelolaan dana desa yang lebih detail, pembentukan unit pengawasan internal di tingkat desa, serta pelibatan auditor independen secara berkala.

Evaluasi kinerja juga perlu dilakukan secara konsisten, tidak hanya oleh kepala desa, tetapi juga oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan pengendalian internal yang lebih kuat, setiap proses pengelolaan keuangan dapat diminimalisir dari risiko penyalahgunaan, sehingga akuntabilitas dana desa akan semakin terjaga.

Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif Sistem Pengendalian Internal (X₂)

No.	Pernyataan	Rata-rata	Kategori
1	Adanya struktur organisasi dan job deskripsi yang jelas pada organisasi pemerintahan desa.	3,86	Baik
2	Perangkat desa dalam menjalankan tugas sudah ada pemisahan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.	4,13	Baik
3	Setiap transaksi dan aktivitas keuangan dilakukan otorisasi oleh Kepala Desa.	4,38	Sangat Baik
4	Informasi laporan keuangan diolah dengan cepat dan tepat waktu.	4,01	Baik
5	Kepala Desa melakukan evaluasi atas perkembangan dan kualitas laporan keuangan secara keseluruhan.	4,13	Baik
Rata-rata		4,10	Baik

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Variabel kompetensi SDM memperoleh rata-rata skor 4,19 dengan kategori baik. Hasil ini menggambarkan bahwa aparatur desa memiliki keterampilan memadai dalam mengoperasikan komputer dan software pendukung, memahami siklus akuntansi, serta mampu menyusun Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa. Bahkan, sebagian besar responden mengakui bahwa mereka sering mengikuti pelatihan teknis dan menjunjung tinggi etika dalam bekerja. Namun, meski berada pada kategori baik, kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan agar pengelolaan dana desa lebih profesional dan akuntabel. Kebijakan yang dapat diterapkan antara lain menyelenggarakan pelatihan reguler tentang akuntansi pemerintahan desa, sistem informasi keuangan, serta regulasi terbaru mengenai dana desa. Selain itu, pengembangan kompetensi dapat diintegrasikan dengan sistem insentif berbasis kinerja untuk mendorong motivasi aparatur dalam bekerja secara transparan dan bertanggung jawab. Dengan SDM yang kompeten, kualitas laporan keuangan desa akan semakin baik, sehingga mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tabel 3. Hasil Analisis Deskriptif Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₃)

No.	Pernyataan	Rata-rata	Kategori
1	Saya memiliki keterampilan dalam menggunakan komputer dan software pendukung dalam menyusun laporan pengelolaan dana desa	4,05	Baik
2	Saya memiliki pengetahuan yang baik mengenai pengelolaan keuangan dana desa.	4,12	Baik
3	Saya memiliki pemahaman teknis mengenai penyusunan anggaran dana desa	4,30	Sangat Baik
4	Saya memahami siklus akuntansi dengan baik	4,34	Sangat Baik
5	Saya mampu menyusun dan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa dengan baik	4,24	Sangat Baik
6	Saya sering mengikuti pelatihan teknis untuk meningkatkan kemampuan menyusun laporan keuangan	4,11	Baik
7	Saya selalu bekerja dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang pegawai	4,22	Sangat baik
Rata-rata		4,19	Baik

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Rata-rata skor partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sebesar 4,03 dengan kategori baik. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemanfaatan hasil pembangunan. Mereka juga diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan kritik kepada pemerintah desa. Akan tetapi, kontribusi masyarakat dalam bentuk ide, tenaga, maupun keterampilan masih belum maksimal. Rendahnya keterlibatan aktif ini berpotensi membatasi fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap akuntabilitas dana desa. Oleh karena itu, kebijakan yang perlu diambil adalah memperkuat forum musyawarah desa secara rutin, menghadirkan kelompok pemuda, perempuan, dan tokoh masyarakat agar partisipasi lebih inklusif. Selain itu, desa dapat memanfaatkan teknologi digital untuk membuka kanal aspirasi dan pengawasan berbasis daring. Dengan keterlibatan masyarakat yang lebih luas dan intensif, pengelolaan dana desa akan lebih transparan, demokratis, serta akuntabel, karena masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga mitra dalam mengawasi jalannya program desa.

Tabel 4. Hasil Analisis Deskriptif Partisipasi Masyarakat (X₄)

No.	Pernyataan	Rata-rata	Kategori
1	Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan tentang pengelolaan keuangan dana desa.	3,83	Baik
2	Masyarakat bersedia untuk berkontribusi memberikan sumbangan ide, keahlian, keterampilan, maupun tenaga untuk pelaksanaan program desa.	3,90	Baik
3	Masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, saran, maupun kritikan kepada pengelola keuangan dana desa.	4,09	Baik
4	Masyarakat bersedia menerima dan memanfaatkan hasil pembangunan dari program penggunaan dana desa.	4,32	Baik
5	Masyarakat bersedia menjaga, melestarikan, dan mengaplikasikan hasil dari program yang dilaksanakan desa	4,01	Baik
Rata-rata		4,03	Baik

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Analisis deskriptif menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa memperoleh rata-rata skor 4,21 dengan kategori sangat baik. Artinya, mayoritas responden menilai pengelolaan dana desa sudah dilakukan secara transparan, melibatkan unsur masyarakat, serta disertai dengan pertanggungjawaban kepada pihak otoritas yang lebih tinggi maupun kepada masyarakat luas. Selain itu, adanya pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus semakin memperkuat aspek akuntabilitas. Walaupun capaian ini tergolong tinggi, kebijakan yang perlu didorong adalah memperkuat sistem transparansi publik dengan kewajiban desa mempublikasikan laporan keuangan melalui papan pengumuman, website desa, maupun media sosial. Mekanisme akuntabilitas horizontal juga perlu diperkuat melalui forum masyarakat yang membahas laporan pertanggungjawaban secara periodik. Selain itu, evaluasi vertikal dari pemerintah kabupaten atau auditor eksternal harus diperluas agar potensi penyimpangan dapat ditekan. Dengan kombinasi transparansi, partisipasi, dan pengawasan yang kuat, akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat terus ditingkatkan dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Tabel 5. Hasil Analisis Deskriptif Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

No.	Pernyataan	Rata-rata	Kategori
1	Pengelolaan keuangan dana desa disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat.	4,13	Baik
2	Tahapan pengelolaan keuangan dana desa melibatkan semua unsur-unsur masyarakat.	4,27	Sangat Baik
3	Penyajian pengelolaan keuangan dana desa telah menyertakan informasi masa lalu.	4,03	Baik
4	Pengelolaan keuangan dana desa dipertanggung jawabkan kepada otoritas yang lebih tinggi (<i>vertical</i>) dan kepada masyarakat luas (<i>horizontal</i>)	4,14	Baik
5	Proses dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dana desa diawasi secara terus menerus.	4,46	Sangat Baik
Rata-rata		4,21	Sangat Baik

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berikut hasil uji asumsi klasik dengan menganalisis menggunakan program SPSS sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance value	Kriteria	VIF	Kriteria
Pemanfaatan teknologi informasi	0,764	0,10	1,309	10
Sistem pengendalian internal	0,406	0,10	2,462	10
Kompetensi sumber daya manusia	0,950	0,10	1,053	10
Partisipasi masyarakat	0,337	0,10	2,965	10

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa semua variabel independen yaitu pemanfaatan teknologi informasi (X_1), sistem pengendalian internal (X_2), kompetensi sumber daya manusia (X_3) dan partisipasi masyarakat (X_4) menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas karena *tolerance value* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Hasil analisis dengan menggunakan program SPSS sebagai berikut:

Tabel 7. Uji Autokorelasi

<i>Unstandardized Residual</i>	
<i>Test Value^a</i>	0,14635
<i>Cases < Test Value</i>	105
<i>Cases >= Test Value</i>	105
<i>Total Cases</i>	210
<i>Number of Runs</i>	98
<i>Z</i>	-1,107
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,268

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Hasil uji autokorelasi menggunakan *Run Test* dengan bantuan program SPSS menunjukkan *p value* sebesar 0,268 > 0,05. Ini berarti antara residual tidak terdapat hubungan korelasi, sehingga tidak terjadi autokorelasi. Hasil analisis dengan menggunakan program SPSS sebagai berikut:

Tabel 8. Uji Heteroskedastisitas

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>			t	Sig.
	B	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	2,654	1,040	2,551	0,011
	Pemanfaatan TI	0,003	0,040	0,005	0,064

SPI	-0,004	0,044	-0,010	-0,0960,924
Kompetensi SDM	0,013	0,026	0,036	0,502 0,616
Partisipasi masyarakat	-0,061	0,050	-0,146	-1,2310,220

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser dengan bantuan program SPSS menunjukkan *p value* untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_1) sebesar 0,949, sistem pengendalian internal (X_2) sebesar 0,924, kompetensi sumber daya manusia (X_3) sebesar 0,616 dan partisipasi masyarakat (X_4) sebesar 0,220. Semua *p value* > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa antar variabel yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 9. Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		210
<i>Normal Parameters^a</i>	<i>Mean</i>	0,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	2,15026177
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,059
	<i>Positive</i>	0,051
	<i>Negative</i>	-0,059
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		0,059
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,070

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan pengujian *Kolmogorov-Smirnov (K - S)* dengan bantuan komputer program SPSS diperoleh nilai *p value* 0,070 > 0,05. Hal ini menunjukkan keadaan yang tidak signifikan, berarti H_0 diterima artinya bahwa data residual berdistribusi normal.

Tabel 10. Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda

Variabel	B	t	Sig.
(Constant)	3,772	2,010	0,046
Pemanfaatan TI	0,294	4,122	0,000
Sistem pengendalian internal	0,174	2,210	0,028
Kompetensi SDM	0,121	2,589	0,010
Partisipasi masyarakat	0,191	2,136	0,034

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan sebagai berikut: $Y = 3,772 + 0,294 X_1 + 0,174 X_2 + 0,121 X_3 + 0,191 X_4$ Interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah:

- 3,772 artinya jika pemanfaatan teknologi informasi (X_1), sistem pengendalian internal (X_2), kompetensi sumber daya manusia (X_3) dan partisipasi masyarakat (X_4) sama dengan nol, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) adalah positif.
- 0,294 artinya apabila pemanfaatan teknologi informasi meningkat, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Sukoharjo, dengan asumsi variabel sistem pengendalian internal (X_2), kompetensi sumber daya manusia (X_3) dan partisipasi masyarakat (X_4) dianggap tetap.
- 0,174 artinya apabila sistem pengendalian internal meningkat, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Sukoharjo, dengan asumsi variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_1), kompetensi sumber daya manusia (X_3) dan partisipasi masyarakat (X_4) dianggap tetap.

- d. 0,121 artinya apabila kompetensi sumber daya manusia meningkat, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Sukoharjo, dengan asumsi variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_1), sistem pengendalian internal (X_2) dan partisipasi masyarakat (X_4) dianggap tetap.
- e. 0,191 artinya apabila partisipasi masyarakat meningkat, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Sukoharjo, dengan asumsi variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_1), sistem pengendalian internal (X_2) dan kompetensi sumber daya manusia (X_3) dianggap tetap.

Berdasarkan hasil analisis, maka variabel yang dominan pengaruhnya terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Sukoharjo adalah variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_1), karena nilai koefisien regresi paling besar yaitu 0,294 di antara koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal (X_2) sebesar 0,174, kompetensi sumber daya manusia (X_3) sebesar 0,121 dan partisipasi masyarakat (X_4) sebesar 0,191.

Tabel 11. Hasil Uji T

Variabel	B	t	Sig.
(Constant)	3,772	2,010	0,046
Pemanfaatan TI	0,294	4,122	0,000
Sistem pengendalian internal	0,174	2,210	0,028
Kompetensi SDM	0,121	2,589	0,010
Partisipasi masyarakat	0,191	2,136	0,034

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 4,122 dengan *p value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan pemanfaatan teknologi informasi (X_1) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y), sehingga hipotesis ke-1 yang berbunyi: "Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Sukoharjo", terbukti kebenarannya. Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 2,210 dengan *p value* sebesar $0,028 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan sistem pengendalian internal (X_2) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y), sehingga hipotesis ke-2 yang berbunyi: "Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Sukoharjo", terbukti kebenarannya. Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 2,589 dengan *p value* sebesar $0,010 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan kompetensi sumber daya manusia (X_3) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y), sehingga hipotesis ke-3 yang berbunyi: "Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Sukoharjo", terbukti kebenarannya. Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 2,136 dengan *p value* sebesar $0,034 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan partisipasi masyarakat (X_4) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y), sehingga hipotesis ke-4 yang berbunyi: "Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Sukoharjo", terbukti kebenarannya.

Tabel 12. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	518,429	4	129,607	27,495	0,000
1 Residual	966,338	205	4,714		
Total	1484,767	209			

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Hasil analisis diperoleh F hitung sebesar 27,495 dengan *p value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti model penelitian yang digunakan untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi (X_1), sistem pengendalian internal (X_2), kompetensi sumber daya manusia (X_3) dan partisipasi masyarakat (X_4) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) pada pemerintah desa di Kabupaten Sukoharjo sudah tepat.

Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,591	0,349	0,336	2,17114

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai *Adjusted R Square* = 0,336 berarti diketahui bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas yaitu pemanfaatan teknologi informasi (X_1), sistem pengendalian internal (X_2), kompetensi sumber daya manusia (X_3) dan dan partisipasi masyarakat (X_4) terhadap variabel terikat yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) pada pemerintah desa di Kabupaten Sukoharjo sebesar 33,6% sedangkan sisanya 66,4% (100%-33,6%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti, misalnya

Pembahasan

1. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 4,122 dengan *p value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan pemanfaatan teknologi informasi (X_1) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y), sehingga hipotesis ke-1 yang berbunyi: "Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Sukoharjo", terbukti kebenarannya. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi, semakin meningkat pula tingkat transparansi, keterbukaan, serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa. Aparatur desa yang telah terbiasa menggunakan komputer untuk penyusunan anggaran dan pelaporan, serta memanfaatkan internet untuk komunikasi data, mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, cepat, dan dapat diakses. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa teknologi informasi dapat mempercepat proses administrasi dan meminimalkan risiko kesalahan, sehingga aparatur desa mampu menghasilkan laporan yang lebih akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hasil penelitian juga didukung hasil statistik deskriptif, yaitu skor rata-rata pemanfaatan teknologi informasi mencapai 4,28 dengan kategori sangat baik, yang berarti perangkat desa relatif kompeten dalam memanfaatkan teknologi sebagai instrumen tata kelola. Hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh Meilisa (2024), Hafizurrahman (2024), Ardianti (2022), Fathurrahman (2022) dan Adelia (2022) memberikan temuan empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 2,210 dengan *p value* sebesar $0,028 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan sistem pengendalian internal (X_2) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y), sehingga hipotesis ke-2 yang berbunyi: "Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Sukoharjo", terbukti kebenarannya. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik struktur organisasi, pemisahan tugas, serta mekanisme otorisasi dan evaluasi, maka semakin tinggi pula akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Deskriptif menunjukkan skor rata-rata 4,10 (kategori baik), yang menandakan bahwa perangkat desa sudah melaksanakan fungsi kontrol dengan cukup memadai, meskipun aspek kecepatan dan ketepatan pengolahan laporan masih perlu ditingkatkan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhaeda (2024), Ardianti (2022), Fathurrahman (2022) dan Sakdiah (2022) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 2,589 dengan p value sebesar $0,010 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan kompetensi sumber daya manusia (X_3) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y), sehingga hipotesis ke-3 yang berbunyi: "Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Sukoharjo", terbukti kebenarannya. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas aparatur desa dalam memahami akuntansi, menyusun laporan keuangan, serta menjunjung etika kerja sangat menentukan keberhasilan akuntabilitas keuangan desa. Hasil penelitian ini didukung hasil uji statistik deskriptif, yaitu kompetensi SDM memiliki skor rata-rata 4,19 (kategori baik), di mana responden mengaku memiliki keterampilan teknis, pengetahuan pengelolaan keuangan, serta sering mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas. Hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nurhaeda (2024), Sundari (2024), Meilisa (2024), Hafizurrahman (2024), Adelia (2022), Ardianti (2022), Fathurrahman (2022) dan Pahlawan (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 2,136 dengan p value sebesar $0,034 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan partisipasi masyarakat (X_4) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y), sehingga hipotesis ke-4 yang berbunyi: "Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Sukoharjo", terbukti kebenarannya. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin aktif masyarakat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dana desa, maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang dapat dicapai. Secara deskriptif, partisipasi masyarakat memiliki skor rata-rata 4,03 (kategori baik), yang berarti masyarakat sudah dilibatkan, meskipun kontribusi ide, tenaga, dan pengawasan belum sepenuhnya optimal. Hasil penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sundari (2024), Hafizurrahman (2024), Nugroho (2022), Harini (2022) dan Pahlawan (2020) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Sukoharjo.
2. Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Sukoharjo.

3. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Sukoharjo.
4. Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Sukoharjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, Anisa Putri. 2022. "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Deli Serdang". *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen*. Vol. 2 No. 1. Hal. 156-167.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hariani, Ni Kadek. 2022. "Kompetensi dan Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa". *Jurnal Akuntansi, Auditing, dan Keuangan*. Volume 6. Nomor 1. Hal. 78-99.
- Kaharudin, Erlitawati. 2024. "Pengaruh Siskeudes, SPIP, Kompetensi Aparat, Partisipasi Masyarakat pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa". *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*. Volume 21 Nomor 02. Hal. 71-80.
- Mardiasmo. 2018. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Meilisa, Farra. 2024. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus Se Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango". *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 5 No. 9. Hal. 3733-3741.
- Nugroho, Ali Tiyas. 2022. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-desa di Kabupaten Ngawi)". *Edunomika*. Vol. 06, No. 02. Hal. 1-9.
- Nurhaeda, Andi. 2024. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Enrekang". *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan (JEAP)*. Volume. 1 No. 3. Hal. 306-317.
- Pahlawan, Enggar Wahyuning. 2020. "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa". *Indonesia Accounting Journal*. Volume 2 No. 2. Hal. 162-172.
- Riyadi, Wulan. 2020. "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka". *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*. Volume 3 No. 2. Hal. 160-168.
- Sujarweni, Wiranata. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Sundari, Shintarani Intan. 2024. "Pengaruh Transparansi, Kompetensi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kantor Desa Se-Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang". *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol. 5 No 4 Hal. 2726-2742.
- Tiarno, Sella Mahcica. 2023. "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penggunaan Siskeudes terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa". *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*. Vol. 7 No. 2. Hal. 1596-1608.